

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia salah satu fungsi yang dijalankan yaitu pemberdayaan, fungsi pemberdayaan pemerintah memiliki berbagai inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah dalam fungsi pemberdayaan adalah mengatur perekonomian masyarakatnya. Desa mempunyai salah satu kewenangan yaitu pemberdayaan yang diharapkan agar dapat memberdayakan usaha-usaha masyarakat agar dapat berkembang. Pemerintah berperan aktif dalam menganalisis, mengetahui faktor yang mendorong, mengetahui faktor penghambat dalam proses pemberdayaan di Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan berkaitan dengan pemberdayaan karena pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Santoso, dkk 2017)

Usaha pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlepas pada pembangunan sektor pertanian, sebagai wujud usaha peningkatan kesejahteraan rakyat yang masih sebagian besar berusaha di sektor pertanian. Pada tahun 2019, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur menduduki peringkat ketiga setelah kategori industri pengolahan (30,24 persen) dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,46 persen), yaitu sebesar 11,43 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan sektor pertanian terus menerus mengalami penurunan hingga 2,22 persen. Besarnya peranan kategori pertanian di tahun 2015 yaitu 13,65 persen, kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,44 persen, kemudian menurun lagi di tahun 2017 menjadi 12,84 persen, lalu di tahun 2018 menjadi 12,90 persen, hingga di tahun 2019 menjadi 11,43 persen. Penurunan kontribusi sektor pertanian membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat pentingnya sektor tersebut terhadap keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur. (Badan PusatS Provinsi Jawa Timur, 2019)

Upaya pemberdayaan umkm dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Salah satu upaya agar menciptakan pelaku agribisnis dan agroindustri

berkembang adalah melalui pemberian pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara misalkan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen keuangan yang baik, manajemen pemasaran yang baik sehingga pelaku agribisnis dan agroindustri mampu menghasilkan produk-produk untuk meningkatkan perekonomian. (Santoso, dkk 2017)

Desa Rambipuji merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Kecamatan Rambipuji tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Rambipuji adalah sebanyak 82, 231 jiwa. Mayoritas pekerjaan masyarakat Rambipuji bekerja dalam sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan dan angkutan. Tidak berhenti di 5 sektor saja, Kecamatan Rambipuji memiliki keunggulan dalam sektor *home industri* diantaranya *home industry* tempe. Mata pencaharian tersebut diminati oleh masyarakat untuk hidup sejahtera. Desa Rambipuji juga menyimpan potensi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wisata, bahkan sangat cocok dijuluki sebagai sentra industri tempe dan tahu.

Pemerintah Desa Rambipuji belum memberikan dukungan kepada UMKM tempe, tahu, budidaya jamur, budidaya perikanan mengenai pengembangan jaringan usaha, pemasaran, mengajarkan tentang pemasaran ke *market place*, pembinaan bagaimana caranya produk unggulan tetap berjalan untuk mengatasi persaingan bisnis yang serupa dan pemerintah desa belum mampu mempromosikan produk unggulan. Hasil penelitian tersebut dapat diperkuat dengan keterangan dari pemilik UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa belum nampak adanya peran Pemerintah Desa mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 dan 10 disebutkan bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh, meningkatkan kemampuan daya saing produk serupa. Maka dari itu Pemerintah Daerah/Desa harus memperhatikan masyarakat atau UMKM di daerah masing-masing sebagai sarana dari pemerintah pusat.

Untuk menentukan indikator keberhasilan peneliti menggunakan dimensi peran menurut Gede Diva (2009:15) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik melakukan kegiatan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Agribisnis dan Agroindustri di Desa Rambipuji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku Agribisnis dan Agroindustri di Desa Rambipuji?
2. Adakah pengaruh peran fasilitator, regulator, katalisator terhadap pemberdayaan pelaku agribisnis dan agroindustri di Desa Rambipuji?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pelaku agribisnis dan agroindustri di Desa Rambipuji
2. Menganalisis apakah ada pengaruh peran fasilitator, regulator, katalisator terhadap pemberdayaan pelaku agribisnis dan agroindustri di Desa Rambipuji.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka dari hasil penelitian ini diharapkan:

1. Bagi Pemerintah Desa

Dapat digunakan bahan evaluasi bagi Pemerintah agar ada pembinaan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pelaku agribisnis dan agroindustri.

2. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan skripsi tingkat perguruan tinggi serta menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dengan mengetahui tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha jamur, Umkm tempe, Umkm Tahu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dengan konteks lain dan variabel yang lebih banyak.